

List of Tax & Customs Regulation February Period I-2026			
No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	PMK Nomor 4 Tahun 2026	6-Feb-26	PPN atas penyerahan jasa angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur idul fitri yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
2	PMK Nomor 1 Tahun 2026	22-Jan-26	Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
2	PENG-1/PJ/2026	20-Jan-26	Daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI-CRS) tahun 2026
3	PER-27/PJ/2025	31-Dec-25	Pedoman pelaksanaan prosedur persetujuan bersama
4	PER-26/PJ/2025	31-Dec-25	Tata cara pelaksanaan penyitaan dan penjualan atas surat berharga berupa saham yang diperdagangkan di pasar modal dalam rangka penagihan pajak
5	PMK Nomor 117 Tahun 2025	31-Dec-25	Perubahan PMK 124 Tahun 2024 ttg organisasi dan tata kerja organisasi Kemenkeu
6	17/MK/BC/2025	31-Dec-25	Pelaksanaan pengawasan ketentuan larangan impor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2025 tentang barang yang dilarang untuk diimpor
7	PER-21/BC/2025	30-Dec-25	Perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2021 tentang tata laksana pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari tempat penimbunan berikat
8	PMK Nomor 114 Tahun 2025	30-Dec-25	Perlakuan atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib serta harta hibahan dalam PPh
9	PMK Nomor 113 Tahun 2025	30-Dec-25	Pengembalian cukai
10	PMK Nomor 112 Tahun 2025	30-Dec-25	Tata cara penerapan P3B
11	PMK Nomor 111 Tahun 2025	30-Dec-25	Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
12	SE-18/PJ/2025	29-Dec-25	Pedoman pelaksanaan prosedur persetujuan bersama
13	PMK Nomor 108 Tahun 2025	29-Dec-25	Petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan utk kepentingan perpajakan
14	PMK Nomor 105 Tahun 2025	29-Dec-25	PPh 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung Pemerintah dlm rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026
15	PENG-54/PJ.09/2025	29-Dec-25	Batas waktu aktivasi akun coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik
16	SE-20/BC/2025	29-Dec-25	Tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
17	PER-20/BC/2025	29-Dec-25	Tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan Pengangkutan barang kena cukai
18	PER-19/BC/2025	24-Dec-25	Perubahan keempat atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata laksana pusat logistik berikat
19	PMK Nomor 99 Tahun 2025	23-Dec-25	Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
20	PENG-5/PJ/2025	23-Dec-25	Imbauan antigratifikasi dalam rangka natal dan tahun baru 2026
21	PMK Nomor 98 Tahun 2025	22-Dec-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas
22	16/MK/BC/2025	22-Dec-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas produk emas yang dikenakan bea keluar
23	PMK Nomor 96 Tahun 2025	19-Dec-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
24	PMK Nomor 92 Tahun 2025	18-Dec-25	Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
25	PMK Nomor 90 Tahun 2025	18-Dec-25	PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yg di tanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
26	PMK Nomor 89 Tahun 2025	18-Dec-25	Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
27	Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025	17-Dec-25	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

28	PENG-4/PJ/2025	17-Dec-25	Perpanjangan masa aktif kode billing untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
29	KEP-251/PJ/2025	15-Dec-25	Kebijakan administrasi perpajakan sehubungan dengan bencana alam di wilayah provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, dan provinsi Sumatera Barat tahun 2025
30	PENG-1/PAN/2025	15-Dec-25	Penyesuaian persyaratan kelengkapan administrasi upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
31	PERMA 3 Tahun 2025	10-Dec-25	Pedoman penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan
32	PER-23/PJ/2025	9-Dec-25	Penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
33	PER-22/PJ/2025	8-Dec-25	Perubahan kelima atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
34	KEP-238/BC/2025	8-Dec-25	Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga
35	KEP-231/BC/2025	4-Dec-25	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhdua
36	1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025	1-Dec-25	Petunjuk pelaksanaan administrasi upaya hukum peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak yang diajukan melalui e-tax court